



KEPENTINGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEPENTINGAN MELINDUNG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
SERING 4001 - 116.000 Di Tahun 2014

PERTANGG

PROPOSALAN YA'ASASAN
MAYORITIS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MELINDUNG HUKUM

Membaca : Surat permohonan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor K/11/DEK/VI/2013 tanggal 10/11/2013 perihal permohonan pengubahan ayat pendirian Yayasan yang diurus tanggal 10 Januari 2013.

Membahas : Bahwa setelah dilakukan prosedur teknis, Atas Perhatian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ada terdapat salah satu materi yang sangat pentingnya harus dalam materi pendirian organisasi, sehingga dapat diartikan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lampiran Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 111), Perubahan (Lampiran Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4122) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115), Terhadap Lambang Negara Republik Indonesia Nomor 4430/Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Terhadap Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Terhadap Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Fiska, dan Fungsionalisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44/HHAT/OT/01/01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Pengubahan Atas Pendirian

YA'ASASAN PENLINDUNGAN SELAMA SELAMA LAINNYA KADANDUNGAN

SILVANIUMI

NPPW : 31.760.197.5.001.000

KEDUA : Berkelanjutan di Desa Cimanggung, Kecamatan Kawandungan, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Atas Nomor 7 tanggal 10 Juni 2013 yang dibuat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berkeputusan di Kabupaten Sukabumi. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2014

A. R. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AYOUB AHMAD, S.H., M.H.
No. 192/14/14/001/1001